

Pengelolaan Manajemen Keuangan pada Lembaga Pendidikan SD Negeri 5 Jaten di Karanganyar Jawa Tengah

Aang Kurnia¹
STIS Darusy Syafa'ah Lampung Tengah
E mail: aangkurnia4@gmail.com

Abstrak

Manajemen keuangan sekolah merupakan sesuatu yang sangat penting dalam mendukung kualitas pendidikan. Untuk mewujudkan pendidikan yang berkualitas maka dibutuhkan manajemen keuangan yang profesional, sehingga masalah terkait dengan keuangan sekolah dapat dikelola secara efektif dan seefisien mungkin untuk mendukung proses pembelajaran yang berkualitas. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana penerapan manajemen keuangan pada lembaga pendidikan di SD Negeri 5 Jaten. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Teknik analisis data menggunakan analisis deskriptif. Hasil analisis bahwa SD Negeri 5 Jaten sudah menerapkan pengelolaan keuangan yang profesional dan sesuai dengan teori yaitu menerapkan perencanaan penganggaran pembiayaan pendidikan, sumber pembiayaan pendidikan, implementasi atau pelaksanaan pembiayaan pendidikan, pertanggungjawaban dan evaluasi pembiayaan pendidikan. Dengan hasil tersebut, secara keseluruhan kegiatan yang berkaitan dengan pengelolaan manajemen keuangan di SD Negeri 5 Jaten sudah sesuai dengan peraturan yang ditetapkan oleh pemerintah.

Key Words: Manajemen, manajemen keuangan, lembaga pendidikan

Pendahuluan

Pada dasarnya di setiap unit kerja selalu berhubungan dengan masalah keuangan, demikian jugapadalembaga pendidikan. Permasalahan yang menyangkut keuangan di sekolah pada dasarnya berkaitan dengan uang sumbangan pembinaan pendidikan (SPP), uang kesejahteraan personel dan gaji serta keuangan yang berhubungan langsung dengan penyelenggaraan kegiatan sekolah seperti perbaikan sarana dan prasarana sekolah. Peningkatan kualitas pendidikan bukanlah tugas yang ringan karena tidak hanya berkaitan dengan permasalahan teknis, tetapi mencakup berbagai persoalan yang sangat rumit dan kompleks, baik

¹Dosen tetap di STIS Darusy Syafa'ah Lampung Tengah.

yang berkaitan dengan perencanaan, pendanaan, maupun efisiensi dan efektifitas penyelenggaraan sistem pendidikan di sekolah.

Peningkatan kualitas pendidikan juga menuntut Manajemen Pendidikan yang lebih baik. Untuk mewujudkan pendidikan yang berkualitas, perlu adanya pengelolaan secara menyeluruh dan profesional terhadap sumber daya yang ada dalam lembaga pendidikan. Untuk itu memerlukan strategi khusus dalam upaya peningkatan sumber daya manusia dan pengelolaannya. Strategi merupakan bagian dari kegiatan yang harus dilaksanakan oleh organisasi atau perusahaan dalam meningkatkan kemampuan dan eksistensi dalam bersaing. Untuk itu, manajemen strategis diperlukan perusahaan/organisasi untuk lebih produktif membangun masa depannya.²

Salah satu sumber daya yang perlu dikelola dengan baik dalam lembaga pendidikan adalah masalah keuangan. Dalam penyelenggaraan pendidikan, keuangan dan pembiayaan merupakan potensi yang sangat menentukan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam kajian manajemen pendidikan, karena keuangan dan pembiayaan pendidikan adalah faktor yang paling penting dalam terlaksananya program yang ada di sekolah. Oleh karena itu dibutuhkan pengelolaan keuangan yang profesional yang baik dan benar yaitu yang dikelola secara efektif dan efisien mungkin sehingga segala proses kegiatan yang ada dapat berjalan sesuai dengan program yang direncanakan.

Manajemen keuangan merupakan salah satu substansi manajemen sekolah yang akan turut menentukan berjalannya kegiatan pendidikan di sekolah. Sebagaimana yang terjadi di substansi pendidikan pada umumnya, kegiatan manajemen keuangan dilakukan melalui proses-proses perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, pengkoordinasian, pengawasan atau pengendalian. Beberapa kegiatan manajemen keuangan yaitu memperoleh dan menetapkan sumber-sumber pendanaan, pemanfaatan dana, pelaporan, pemeriksaan dan pertanggungjawaban.

²Arif Ismunandar, *Analisis Strategi Kualitas Pelayanan Publik pada Perusahaan Jasa*, (Jurnal Dewantara, 2020), Vol. IX, No. 1, h. 94.

Menurut Rohiat manajemen merupakan alat untuk mengelola sumber daya yang dimiliki secara efektif dan efisien untuk mencapai tujuan yang harus dipahami oleh kepala sekolah.³ Sedangkan Mulyasa mengartikan manajemen sebagai segala sesuatu yang berkenaan dengan pengelolaan proses untuk mencapai tujuan yang ditetapkan baik tujuan jangka pendek, jangka menengah maupun jangka panjang.⁴

Dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 tahun 2007 tentang pengelolaan keuangan Negara atau daerah bahwa pengelolaan keuangan adalah pengelolaan kas dan surat berharga termasuk menanggulangi kekurangan kas dan memanfaatkan kelebihan kas secara optimal.⁵ Sedangkan, dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2008 bahwa pendanaan pendidikan terdapat prinsip transparansi, akuntabel, efektif dan efisien.⁶ Kegiatan manajemen keuangan dan pembiayaan pada lembaga pendidikan perlu memperhatikan beberapa prinsip.

Menurut Arwil dayanto ada beberapa prinsip dalam pengelolaan keuangan di lembaga pendidikan yaitu:

1. Hemat tidak mewah, efisien dan sesuai dengan kebutuhan teknis yang disyaratkan dalam regulasi dan kebijakan yang berlaku,
2. Terarah dan terkendali sesuai dengan rencana, program atau kegiatan lembaga pendidikan,
3. Keharusan penggunaan kemampuan atau hasil produksi dalam negeri sejauh hal ini memungkinkan,
4. Transparansi sebagai implikasi dari keterbukaan informasi publik,

³Rohiat, *Manajemen Sekolah Teori Dasar Dan Praktek*. (Bandung: Refiika Aditama, 2009), h. 14.

⁴Mulyasa, *manajemen Berbasis Sekolah*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2003), h. 20.

⁵Peraturan Pemerintah Republic Indonesia Nomor 39, *Tentang Pengelolaan Uang Negara Atau Daerah*, 2007.

⁶Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 48, *Tentang Pendanaan Pendidikan*, 2008.

5. Penguatan partisipasi publik atau masyarakat.⁷

Berdasarkan pendapat di atas, manajemen keuangan sekolah dapat diartikan sebagai rangkaian aktivitas mengatur keuangan sekolah mulai dari perencanaan, pembukuan, pembelanjaan, pengawasan dan pertanggungjawaban keuangan sekolah. Sehingga sekolah memiliki tugas untuk mengelola keuangan berdasarkan prinsip pengelolaan keuangan tersebut dan dapat dimanfaatkan secara optimal.

Melalui kegiatan manajemen keuangan dan pembiayaan di sekolah dapat memberikan informasi terhadap kebutuhan pendanaan, pembiayaan kegiatan dan anggaran lembaga pendidikan dapat direncanakan dan dilaksanakan. Selanjutnya dengan adanya manajemen keuangan sekolah semua kegiatan pembiayaan dapat dibukukan secara transparan, digunakan untuk membiayai pelaksanaan program lembaga pendidikan secara efektif dan efisien sehingga dapat dipertanggungjawabkan untuk memberikan rasa puas atau kepercayaan kepada pihak yang memberikan donasi untuk kegiatan lembaga pendidikan atau sekolah. Untuk mengetahui bagaimana pengelolaan keuangan yang baik pada lembaga pendidikan maka penelitian ini akan menganalisis mengenai manajemen keuangan sekolah pada SD Negeri 5 Jaten, yaitu bagaimana penerapan manajemen keuangan sekolah ini apakah sudah sesuai dengan aturan yang ditetapkan oleh pemerintah atau belum.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif. Adapun data yang dihasilkan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif yaitu menganalisis fakta yang ada secara sistematis mengenai penerapan manajemen keuangan sekolah. Penelitian ini dilakukan di SD Negeri 5 Jaten Karanganyar Jawa Tengah.

⁷Arwildayanto, *Manajemen Keuangan dan Pembiayaan Pendidikan*, (Bandung: Widya Padjajaran, 2017), h.17.

Selanjutnya ada beberapa teknik pengumpulan data dalam penelitian ini. Menurut Sugiyono bahwa tehnik pengumpulan data dapat dilakukan dengan cara interview (wawancara), kuesioner (angket), observasi (pengamatan) dengan menggabungkan ketiganya.⁸ Adapun teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan observasi, wawancara, dan dokumentasi. Sedangkan untuk analisis data menggunakan analisis deskriptif.

Hasil dan Pembahasan

1. Manajemen Keuangan Sekolah

Berdasarkan hasil penelitian di SD Negeri 5 Jaten diperoleh beberapa kegiatan dalam manajemen keuangan sekolah yaitu perencanaan penganggaran pembiayaan pendidikan, sumber anggaran biaya pendidikan, implementasi atau pengelolaan pembiayaan pendidikan, pengawasan dan pertanggungjawaban pembiayaan pendidikan, dan evaluasi pembiayaan pendidikan.

a. Perencanaan Penganggaran Pembiayaan Pendidikan

Berdasarkan hasil wawancara bahwa proses yang pertama dalam perencanaan penganggaran biaya pendidikan pada SD Negeri 5 Jaten yaitu diawali dengan rapat yang membahas tujuan strategis dalam jangka waktu tertentu misalnya jangka waktu pendek, menengah dan panjang. selanjutnya pihak sekolah akan mengadakan rapat untuk menyusun Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Sekolah (RAPBS). Rapat pembahasan RAPBS di SD N 5 Jaten dihadiri oleh pihak sekolah dan dari pihak komite sebagai pengawas dalam pengelolaan manajemen keuangan sekolah. Dalam RAPBS akan terdapat gambaran mengenai pendapatan dan pengeluaran atau belanja sekolah dalam jangka waktu tertentu yaitu jangka pendek, menengah dan jangka panjang.

Selanjutnya untuk pembagian dan sesuai dengan kebutuhan yang sudah diprediksikan sebelumnya yaitu sesuai dengan hasil rapat. Pembagian proporsi biaya tersebut untuk kebutuhan sekolah seperti sarana dan prasarana, pengembangan SDM guru, honor guru WB, biaya perjalanan, biaya

⁸Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan*. (Bandung: Alfabeta, 2016), h. 193.

pembelian perawatan aktiva tetap, peningkatan akademik siswa, dan keperluan-keperluan lainnya terkait dengan proses belajar mengajar di kelas.

b. Sumber Anggaran Biaya Pendidikan

Sumber pendapatan SD Negeri 5 Jaten di dapat dari beberapa sumber yaitu BOSN (Bantuan operasional sekolah Nasional) dan BOSDA (Bantuan Operasional Daerah) dan pengeluaran dana tersebut dilaksanakan secara bertahap yaitu 3 bulan sekali dan 6 bulan sekali tergantung dari kebijakan pemerintah. Untuk dana BOSN setiap siswa mendapatkan bantuan sebesar Rp 580.000,00 disesuaikan dengan jumlah siswa yang ada. Sedangkan untuk biaya SPP di SD Negeri 5 Jaten di gratiskan, tidak dipungut biaya sama sekali sesuai dengan program pemerintah yaitu wajib belajar 9 tahun. Untuk mencukupi semua biaya pendidikan SD Negeri 5 Jaten hanya mengelola dana yang besumber dari BOSN dan BOSDA.

Sedangkan untuk buku paket pihak sekolah juga tidak memungut biaya dari wali murid karena sudah dianggarkan dalam RAPBS, sedangkan untuk LKS pihak sekolah memungut biaya dengan memberikan subsidi sehingga tidak membebani siswa, karena LKS ini nantinya akan diberikan kepada siswa. Jadi tidak ada lagi alasan siswa putus sekolah karena terbebani oleh biaya yang banyak.

c. Pengelolaan Pembiayaan Pendidikan

Pengelolaan keuangan di SD Negeri 5 Jaten dialokasikan sesuai dengan RAPBS dan kebutuhan yang sudah di anggarkan sebelumnya, sedangkan jika ada biaya-biaya lain yang tidak terduga akandibiayai dari dana yang belum terpakai. Namun dalam pelaksanaannya di SD Negeri 5 Jaten sendiri tidak ada kendala sama sekali karena dana bantuan dari BOSN diberikan secara rutin 3 bulan sekali sehingga semua pengelolaan keuangan bisa tercover dengan baik.

Sedangkan jika dilihat dari sisi akedemik yang berkaitan dengan visi dan misi sekolah bahwa dalam kenyataannya belum terlaksana sepenuhnya, misalnya kelengkapan berupa lap komputer dan media belajar di SD Negeri 5 Jaten ini belum ada, hanya ada komputer di ruang guru yang digunakan untuk

administrasi sekolah saja, sedangkan pengenalan komputer seharusnya sudah dilakukan untuk menyesuaikan tuntutan perkembangan ilmu dan teknologi sesuai dengan misi SD Negeri 5 Jaten. Dan seharusnya masalah ini juga masuk dalam anggaran pendidikan.

d. Pengawasan dan Pertanggungjawaban Pembiayaan Pendidikan

Kegiatan Pengawasan dan pertanggungjawaban dalam pembiayaan pendidikan di SD N 5 Jaten dilakukan oleh kepala sekolah selaku pimpinan, kemudian dari orang tua yang diwakili oleh Komite Sekolah, dari dinas UPTD karena pihak sekolah menggunakan uang pemerintah sehingga harus melaporkan SPJ kepada pemerintah. Dalam melakukan pertanggungjawaban pihak sekolah memberikan laporan keuangan kepada pemerintah pusat. Untuk laporan intern sekolah rutin dilakukan setiap tiga bulan sekali sebagai pertanggungjawaban.

e. Evaluasi Pembiayaan Pendidikan

Pertanggungjawaban keuangan sekolah menyangkut seluruh pengeluaran dana sekolah dalam kaitannya dengan apa yang telah dicapai sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan. Evaluasi dan pertanggungjawaban terhadap apa yang telah dicapai harus dilakukan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan kepada pihak-pihak yang berkepentingan (pemerintah, masyarakat, dan wali murid). Dalam proses evaluasi dan pertanggungjawaban ada beberapa hal yang akan dibahas yaitu terhadap apa yang telah dicapai apakah sudah dilakukan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya serta untuk merumuskan langkah berikutnya apabila ada yang tidak sesuai dengan rencana awal.

Proses evaluasi pada SD Negeri 5 Jaten dilakukan secara rutin yang dilakukan setiap 3 bulan sekali, karena setiap akhir tahun sekolah dituntut untuk mempertanggungjawabkan setiap dana yang dikeluarkan selama tahun anggaran.

Hasil Analisis Manajemen Keuangan Sekolah

Berdasarkan analisis bahwa untuk mewujudkan pengelolaan keuangan yang professional seperti di atas maka diperlukan manajemen keuangan yang baik dan benar yaitu dengan pengelolaan yang efektif serta efisien mungkin agar segala proses kegiatan yang ada dapat berjalan baik dan lancar. Pada hasil observasi di SD Negeri 5 Jaten sudah melakukan pengelolaan keuangan yang profesional dan sudah sesuai dengan teori yang ada yaitu menerapkan perencanaan penganggaran pembiayaan pendidikan, sumber pembiayaan pendidikan, implementasi atau pelaksanaan pembiayaan pendidikan, pertanggung jawaban dan evaluasi pembiayaan pendidikan. Jadi manajemen keuangan yang baik sangat diperlukan agar segala proses kegiatan yang ada dapat berjalan dengan efektif dan efisien.

Hasil tersebut sesuai dengan temuan Muhammad bahwa pengawas sekolah agar dapat mengarahkan dan mengawasi kepada sekolah dalam peningkatan mutu pendidikan terkait perencanaan program sekolah, pelaksanaan program dan hambatan yang dihadapinya secara tepat guna, efektif dan efisien sehingga mutu pendidikan di sekolah tersebut dapat ditingkatkan.⁹ Selanjutnya menurut Stuart menyatakan bahwa teknologi akuntansi juga memberikan peran penting dalam pengelolaan pelayanan publik, termasuk dalam pendidikan.¹⁰ Jadi akuntabilitas dalam manajemen keuangan sekolah sangat berarti dan dibutuhkan sehingga dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan perencanaan yang telah ditetapkan. Sedangkan pada SD Negeri 5 Jaten sendiri sudah melakukan pengelolaan keuangan dengan baik yaitu melakukan pencatatan akuntansi sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah maka pertanggungjawaban dapat dilakukan atau ditujukan kepada orang tua, masyarakat dan pemerintah.

Pernyataan tersebut juga diperkuat oleh hasil temuan Koross, bahwa keterlibatan orang tua memiliki pengaruh positif pada hasil pengelolaan manajemen keuangan disekolah karena partisipasi orang tua dapat memiliki dampak positif pada proses belajar mengajar, sehingga dibutuhkan akuntabilitas

⁹ Muhammad, *Manajemen Sekolah Dalam Meningkatkan Mutu Pendidikan Pada SD N Dayah Guci Kabupaten Pidie*. (Jurnal Administrasi Pendidikan, 2015), Vol. 4, No. 1, h. 93-103.

¹⁰ Stuart. T., J., Guthrie, *Budgeting In New Zealand Secondary School In A Changing Devolved Financial Management Environment*. (Journal Of Accounting & Organizational Change, 2017), Vol. 3, No. 1, h. 4-28.

keuangan yang transparansi yang akan memperkuat kemitraan antara asosiasi guru, orang tua murid, masyarakat dan administrasi sekolah.¹¹Selanjutnya Sri Rahayu juga menyatakan bahwa kurangnya partisipasi orang tua dan masyarakat menyebabkan rendahnya transparansi dan akuntabilitas pada keuangan sekolah. Jadi peran pemerintah, orang tua siswa dan masyarakat sangat berpengaruh terhadap proses monitoring dan evaluasi biaya pendidikan yang nantinya akan menentukan kualitas pendidikan.¹²

Berdasarkan implementasi di lapangan pada SD Negeri 5 Jaten bahwa sekolah ini sudah menerapkan kegiatan pengelolaan manajemen keuangan sekolah dengan baik dengan melibatkan peran pemerintah, kepala sekolah, orang tua siswa dan masyarakat, meskipun ada bagian terkecil yang dibutuhkan belum terlaksana yaitu kurangnya perlengkapan media pembelajaran, tetapi secara keseluruhan kegiatan yang berkaitan dengan pengelolaan manajemen keuangan pada SD Negeri 5 Jaten sudah sesuai dengan peraturan yang ditetapkan oleh pemerintah.

Simpulan

Berdasarkan hasil analisis di atas dapat disimpulkan bahwa di SD Negeri 5 Jaten sudah melakukan pengelolaan keuangan yang profesional dan sudah menjalankan fungsi manajemen dengan baik yaitu dengan menerapkan perencanaan penganggaran pembiayaan pendidikan, sumber pembiayaan pendidikan, implementasi atau pelaksanaan pembiayaan pendidikan, pertanggung jawaban dan evaluasi pembiayaan pendidikan. Karena pada dasarnya peningkatan kualitas pendidikan bukanlah tugas yang ringan karena tidak hanya berkaitan dengan permasalahan teknis, tetapi mencakup berbagai persoalan yang sangat rumit dan kompleks, baik yang berkaitan dengan perencanaan, pendanaan, maupun efisiensi, efektifitas penyelenggaraan sistem persekolahan dan peningkatan kualitas pendidikan tetapi juga menuntut Manajemen Pendidikan yang lebih baik. Oleh

¹¹ Koross, P., K., Ngware, M., W, *PricipalsAnd Student Perceptions On Parental Contribution To Financial Management In Secondary Schools In Kenya. (Journal Quality Assurance In Education, 2009)*, Vol. 17, No. 1, h. 61-78.

¹² Rahayu. S, *Budgeting Of School Operational Assistance Fund Based On The Value Of GotongRotong. (Journal Social And Behavioral Sciences, 2015)*, Vol. 211, No. 1, h. 364-369.

karena itu manajemen sekolah merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi kualitas pendidikan.

DAFTAR PUSTAKA

Arif Ismunandar, *Analisis Startegi Kualitas Pelayanan Publik pada Perusahaan Jasa*, Jurnal Dewantara, 2020, Vol. IX , No. 1.

Arwildayanto. 2017. *Manajemen Keuangan dan Pembiayaan Pendidikan*. Bandung. Widya Padjadjaran.

Koross, P., K., Ngware, M., W. 2009. *Principals' and students' perceptions on parental contribution to financial management in secondary schools in Kenya. Quality Assurance in Education*. Vol. 17, No. 1.

Muhammad. 2015. *Manajemen Sekolah Dalam Meningkatkan Mutu Pendidikan Pada SDN Dayah Guci Kabupaten Pidie*. Jurnal Administrasi Pendidikan. Vol. 4, No. 1.

Mulyasa. 2003. *Manajemen Berbasis Sekolah*. Bandung: Remaja Rosdakarya.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2007
Tentang *Pengelolaan Uang Negara/Daerah*.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2008
Tentang *Pendanaan Pendidikan*.

Rahayu. S. 2015. "Budgeting of School Operational Assistance Fund Based on The Value of Gotong Royong". *Social and Behavioral Sciences*. Vol. 211, No. 1, h. 364 – 369.

Rohiat. 2009. *Manajemen Sekolah Teori Dasar dan Praktek*, Bandung: PT. Refika Aditama.

Stuart. T., J., Guthrie. 2007. "Budgeting in New Zealand secondary schools in a changing devolved financial management environment". *Journal of Accounting & Organizational Change*. vol. 3, no. 1, h. 4-28.

Sugiyono. 2016. *Metode Penelitian Pendidikan*. Bandung: Alfabeta